

# **LITIGASI**

**JURNAL ILMU HUKUM**

**Rekonstruksi Kedudukan Hukum Adat  
Dalam Pembangunan Hukum Dewasa Ini**

**Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945  
Sebagai Dasar Perekonomian Indonesia :  
Terjadi Penyimpangan Terhadap Konstitusi**

**Meneguhkan Rumah Hukum Pancasila  
(Kajian Yuridis Sosiologis Nilai-Nilai Pancasila  
Ke Dalam Pembentukan Undang-Undang  
Pasca Amandemen UUD 1945)**

**Lembaga Pengawas Tunggal  
Dalam Upaya Menciptakan Stabilitas Sistem Keuangan**

**Kejahatan Perdagangan Manusia Di Abad 21  
Dalam Perspektif Hukum Internasional**

**Penyelesaian Sengketa  
Masyarakat Gampong Aceh Setelah Berlakunya  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006**



## DAFTAR ISI



### HASIL PENELITIAN

Halaman 780

Rekonstruksi Kedudukan Hukum Adat Dalam Pembangunan Hukum Dewasa Ini

Jaja Ahmad Jayus | Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.

Halaman 814

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Dasar Perekonomian Indonesia: Terjadi Penyimpangan Terhadap Konstitusi

Elili Ruslina | Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.

### ARTIKEL

Halaman 878

Meneguhkan Rumah Hukum Pancasila (Kajian Yuridis Sosiologis Nilai-Nilai Pancasila Ke Dalam Pembentukan Undang Undang Pasca Amandemen UUD 1945)

Jawahir Thontowi | Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Halaman 910

Lembaga Pengawas Tunggal Dalam Upaya Menciptakan Stabilitas Sistem Keuangan

Hassanain Haykal Dan Ocktavianus Hartono | Fakultas Hukum Universitas Maranatha Bandung.

Halaman 938

Kejahatan Perdagangan Manusia Di Abad 21 Dalam Perspektif Hukum Internasional

Emma V.T. Senewe | Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado.

Halaman 992

Penyelesaian Sengketa Masyarakat Gampong Aceh Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006

Sulalman | Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.

# REKONSTRUKSI KEDUDUKAN HUKUM ADAT DALAM PEMBANGUNAN HUKUM DEWASA INI

JAJA AHMAD JAYUS

Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Besar No. 68, Telp. (022) 4262226,  
Fax. (022) 4217340. Email: jayus\_ahmad@yahoo.com

## ABSTRAK

Hukum Adat sebagai hukum yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat (*the living law*) memiliki peran strategi dalam pembentukan hukum nasional yang akan datang, namun suasana globalisasi membawa perubahan sosial yang cepat dimana hukum adat seakan terpinggirkan. Kedudukan hukum adat sebagai bagian integral dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia selain hukum Islam dan hukum barat, memiliki dimensi penting dalam pembinaan hukum nasional dan pembangunan pada umumnya. Pembinaan hukum nasional memiliki dimensi pemeliharaan, dimensi pembaharuan, dan dimensi penciptaan. Makna dimensi pemeliharaan bahwa hukum adat dipelihara, dipertahankan dan di dalam penciptaan perlu ada dinamika dan kearifan artinya hukum adat terbuka untuk mengikuti perubahan dengan tetap mempertahankan keasliannya, sehingga ada pembaharuan yang sesuai dengan tuntutan perubahan.

Kata Kunci : Rekonstruksi, Kedudukan, Hukum Adat, Pembangunan Hukum

## ABSTRACT

*Custom as a living and growing law among the society has a strategic role in shaping the future national law, but in the other hand globalization has struck and brought some social changes causing this living law left behind. The position of custom in Indonesia legal system is side by side with Islamic law and Dutch law, it has an important dimension on national law development in general. This development is containing maintenance dimension, renewal dimension, and creation dimension. The essence of maintenance dimension is that living law must be retained, sustained and contained the local values. It means this living law is open to be a part of dynamic social changes yet still keep holding its originality. So that Indonesian living law will still exist in the future.*

*Key Words : Reconstruction, Position, Adat Law, Legal Development.*





# **LITIGASI**

JURNAL ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PASUNDAN

Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung 40261

Telp. 022-4262226, 4217343

Fax. 022-4217340

Website: <http://www.hukum-unpas.ac.id>

e-mail: [litigasi.unpas@gmail.com](mailto:litigasi.unpas@gmail.com)